

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985)
- Morris L. Cohen, Legal Research, dalam Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005)
- F. Sugeng Susanto, Penelitian Hukum, (Yogyakarta: CV Ganda, 2007)
- Peter Mahmud Marzuki , Penelitian Hukum: Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Raja Grafindo, 1995)
- Ismail Nurdin, Etika Pemerintahan Norma, Konsep dan Pratek Etika Pemerintah, (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2017)
- Elisabet Yunaeti Anggraeni dan Rita Irviani, Pengantar Sistem Informasi, (Jakarta: CV Andi Offset, 2017)
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2018)
- Miftah Thoha, Reformasi Birokrasi Indonesia dan Revolusi Industri 4.0, Yayasan Pustaka Obor dengan Pusat penelitian badan keahlian DPR RI, (Jakarta: Badan Kahlian DPR RI 2019)
- Sopnar Maru Hutagalung, Pratik Peradilan Perdata, Kepailitan dan Alternatif Penyelesaiang Sengketa, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019)

Muhamamad Sawir, Birokrasi Pelayanan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi, (Sleman, CV Budi Utama, 2020)

Sugeng, Hukum Telematika Indonesia, (Jakarta, Kencana, 2020)

Abdul Halim Barkatullah, Hukum Transaksi Elektronik sebagai panduan dalam menghadapi Era digital Bisnis E commerce,(Bandung: Nusa Media, 2020)

Agus Dwiyanto, Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia, (Sleman: Gajah Mada University Press, 2021)

Anton Surya Jaya dkk, Legalitas Cryptocurrency di Indonesia,(Bojong Jawa tengah: PT Nasya Expanding Management, 2022

Farid Wajdi, Andryan, Hukum dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022)

2. Jurnal

Sulaiman, Nur Arifudin dan Lily Triyana, Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata, Risalah Hukum, Volume 16 Nomor 2 Juni-Desember 2020.

Hari Agus Santoso, Perspektif Keadilan Teori Gustav Rabruch dalam Putusan PKPU ; Jurnal Jatiswara Vol.36 No.3 November 2021, Fakultas Hukum Universitas Mataram , 2021

3. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab II tentang Pembuktian dengan
Tulisan Pasal 1875;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

Undang-Undang 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Tanda Tangan Elektronik;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintah
berbasis Elektronik;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2022
Tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

4. Website / Internet

Mahkamah Agung, "Legalitas tanda tangan elektronik pejabat dalam
Rangka mendukung e-government"

<https://www.mahkamahagung.go.id/artikel/3737/legalitas-tanda-tangan-elektronik-pejabat-dalam-rangka-mendukung-e-government/>

Diakses tanggal 12 Oktober 2022

Ombudsman RI “Memahami hak dan kewajiban masyarakat dalam

Pelayanan publik”

<https://www.ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--memahami-hak-dan-kewajiban-masyarakat-dalam-pelayanan-publik> diakses tanggal 10 Oktober 2022

Sertifikat Elektronik | bssn.go.id diakses tanggal 31 Oktober 2022

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi –

Pejabat Tak Boleh Berlama-lama Tanda Tangan Perizinan (menpan.go.id) diakses tanggal 10 Oktober 2022

Hukum Online ,”Begini Pembuktian Tanda Tangan Elektronik di Pengadilan”.<https://www.hukumonline.com/klinik/a/begini-pembuktian-tanda-tangan-elektronik-di-pengadilan-lt62444b29a4d00/> diakses pada 15 Mei 2024

Hukumonline “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Notaris”<https://www.hukumonline.com/klinik/a/legalitas-penggunaan-tanda-tangan-elektronik-oleh-notaris-lt5cd238184b299>” diakses tanggal 16 Mei 2024

5. Wawancara / Diskusi:

Hasil wawancara dengan Bapak Ferry Indrawan, S.H, Kabag Hukum dan Kerja sama, Badan Siber dan Sandi Negara, Aviary Tangerang, 14 Februari 2021, Pukul 13.30 WIB